

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun desa partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- BPS. (2018). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018, (57), 1–8.
- BPS Provinsi Banten. (2018). Profil Kemiskinan di Banten Maret 2018, 1–8.
- Bappenas. (2011). Evaluasi Pembangunan Perdesaaan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 2011.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif & desain riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko Priyo Purnomo, R. R., & Rendra setyadiharja, A. M. (2018). *Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat*.
- Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, D. R. P. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Goldsmith, S., & Kettl, D. F. (2009). *unlocking the power of networks Keys to High-Performance Government*.
- Hartman, C., et al. (2002). *Environmental collaboration: potential and limits*. In T. de Bruijn & A. Tukker (Eds.), *Partnership and Leadership: Building Alliances for a Sustainable Future* (pp. 21-40). Dordrecht: Boston: Kluwer Academic Publishers. And, Cordery, J.
- Helen Florensi. (2014). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2.

- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit. Humaniora Utama. Bandung.
- Jhon Wanna, 2008. *Collaborative Governance, A new era of public policy in Australia?*, *Collaborative Government: meanings, dimensions, drivers and Outcome*, edited by Janine O'Flynn and John Wanna ANU Pres, Australia, (hal.3).
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, Mathew, BA, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif* Penerjemah Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press.
- Purwanti, Nurul D, 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*, Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM.
- Ratner. 2012. *Collaborative Governance Assessment*. Malaysia: CGIAR.
- Santoso, P. (2006). *Pembaharuan desa secara partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedarmayati, 2003. *Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung, Mandar Maju.
- Sudarmo, 2011, *Issu-Issu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*, Surakarta: Smart Media.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahjudin Sumpeno, Arief Setiabudi, Wahyudin Kessa, dkk. (2016). *Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat*. Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

Jurnal

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Arif Sofianto. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Jurnal Matra Pembaruan*, 1(Inovasi kebijakan), 23–32.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. Retrieved from <http://repository.unair.ac.id/67685/>.
- Aziza Bila & Boni Saputra, (2019). Collaborative Governance Strategy In Government Sector . *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 09 (02).
- Bryman, A. (2012). Social Research Methods. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, & S. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. *Administrasi Publik*, 1(6), 1203–1212.
- Dina, W. (2012). The Research Design Maze: Understanding Paradigms, Cases, Methods and Methodologies. *Journal of Applied Management Accounting Research*, 10, 69–80.
- Farid, M., Antikowati, A., & Indrayati, R. (2017). Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(2), 95. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i2.5128>.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi), II, 200–208.

- Harmawan, B. N., Wasiati, I., & Rohman, H. (2017). Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival (*Collaborative Governance in Local Culture Values Development Program Through Banyuwangi Ethno Carnival, IV*), 50–55.
- Junaidi. (2015). Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik Di Kota Tanjungpinang. *Naskah Publikasi*, 1–35.
- Jung, Y. D., Mazmanian, D., & Tang, S. Y. (2009). Collaborative governance in the united states and korea: Cases in negotiated policymaking and service delivery. *International Review of Public Administration*, 13(April), 1–11. <https://doi.org/10.1080/12294659.2009.10805136>.
- Kushandajani. (2015). Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Yustisia*, 4(2), 369–396.
- Muhammad Eko Atmojo, Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, M. A. P. (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo Muhammad Eko Atmojo , Helen Dian Fridayani , Aulia Nur Kasiwi , Mardha Adhi Pratama Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Univeristas Muhammadiyah. *Sosial Politik Humaniora*, 5(1), 126–140.
- M. Zaini Harfi. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang-Legal Political On The Establishment Of Village According To Act Number 6 Year 2014 Concerning The Village. *Ius*, 4(6), 408–422.
- Richard Timotius. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Kontelasi Desentralisasi Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Universitas Indonesia*, 48(2), 323–344.
- Satriawan, M. I. (2013). Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia. *Ilmu Hukum*, 7(2), 149–159.
- Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap, & M. A. (2018). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat, 10(1),

146–154.

Sudarmo, 2009, *Elemen –Elemen collaborative Leadership dan Hambatan-Hambatan Bagi Pencapai Efektivitas collaborative governance*. Jurnal Spirit Publik. Vol. 5 No. 2.

Peraturan

Kementrian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015. (2015). Indeks Desa Membangun . Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, 293.

LKPJ Desa Bolang 2018. (2018).

LPPD Desa Bolang Tahun 2018. (2018).

Peraturan Bupati Lebak Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Salinan Undang - Undang No 6 Tahun 2014*, (1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Peraturan Desa Bolang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019. (2018).

Peraturan Desa Bolang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2018. (2017).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Salinan Undang - Undang No 6 Tahun 2014*, (1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

UU No. 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja. (1969). UU No. 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja, (V), 1–47.